

BUDAYA DAERAH DAN JATI DIRI BANGSA:

Pemberdayaan Cerita Rakyat dalam Memasuki Otonomi Daerah dan Globalisasi

Putera Manuaba

Budaya daerah merupakan kekayaan bangsa yang perlu diperhatikan dan ditangani secara serius, terutama dalam memasuki otonomi daerah dan era globalisasi. Percaya atau tidak, pentingnya keberadaan budaya daerah, karena budaya ini dalam kenyataannya memberi andil yang sangat besar bagi pembentukan jati diri bangsa, dan juga bagi proses regenerasi bangsa kita.

Sehubungan dengan hal tersebut, kita harus segera insyaf dari "keterlengaan" dan "keterpukauan" pada budaya asing yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, dan kini kita mesti lebih *concern* pada budaya kita sendiri yakni budaya Indonesia --yang di dalamnya tercakup beranekaragam budaya daerah.

Namun, di sini, kita sama sekali bukan berarti mengabaikan keberadaan budaya asing; budaya asing tetap menjadi perhatian kita dalam kapasitasnya sebagai pembanding demi pengembangan budaya kita sendiri. Kata van Peursen (1985:196), "Tanpa dunia luar tidak ada pengalaman batin, kita tidak dapat berbicara mengenai makna dunia atau adanya". Yang terang, kini kita perlu mereposisi secara proporsional keberadaan budaya daerah yang beranekaragam itu dalam konteks budaya-budaya asing.

Secara lebih awal, kita juga seharusnya menyadari --dengan sepenuh hati-- bahwa Indonesia sebagai bangsa yang sangat beraneka ragam (*plural*) merupakan suatu keniscayaan, yang tidak terelakkan. Untuk itu, kita mesti memperhitungkan seluruh unsur keanekaragaman itu dalam

upaya pembangunan bangsa (*nation-building*) sesuai dengan kondisi perkembangan zaman. Secara realistis, keanekaragaman bangsa kita itu dapat dilihat dalam hal suku bangsa, agama, ras, golongan, bahasa, dan juga budaya.

Dalam tulisan ini, pembicaraan hanya difokuskan terbatas pada unsur "budaya". Dalam budaya ini secara khusus akan dibicarakan tentang "cerita rakyat" yang inheren dalam unsur budaya tersebut. Jika keanekaragaman bangsa ini merupakan keniscayaan, pluralisme budaya pun secara otomatis merupakan keniscayaan. Maka, manakala kita menyebut "budaya Indonesia", yang teracu dan tercakup di dalam kognisi kita adalah "beranekaragam budaya daerah" yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Indonesia (entah budaya Jawa, Bali, Lombok, Minangkabau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, dan sebagainya).

Dengan demikian, budaya daerah sebenarnya menampilkan dirinya dalam konfigurasi yang sangat pluralistik. Dalam konsep pluralisme, keanekaragaman itu merupakan kekayaan yang patut dilestarikan dan dikembangkan secara kondusif. Pluralisme juga mengakui bahwa realitas itu tidak "tunggal", sehingga keanekaragaman budaya Indonesia tidak perlu disatukan. Dalam pengertian, pengembangan berbagai budaya itu tetap didasarkan kepada prinsip pluralistik.

Selama ini, keberadaan dan pengembangan budaya daerah kurang mendapat perhatian. Budaya daerah, yang sebenarnya sangat penting dan menjadi basis budaya

bangsa, justru hanya dianggap sebatas "pendukung" semata dari apa yang disebut "budaya nasional". Untuk itu, kini keberadaan budaya daerah dalam konteks pembentukan jati diri bangsa, perlu direposisi dan dipikirkan secara serius keberadaan dan peranannya dalam masyarakat Indonesia. Artinya, perlu ada upaya pemberian makna agar budaya daerah jadi sesuatu yang bermakna (*meaningful*) bagi masyarakat dan juga mendapat penghargaan yang selayaknya dalam karakteristik pluralistiknya.

Terlebih lagi dalam rangka memasuki diberlakukannya otonomi daerah dan bergulirnya era globalisasi, budaya daerah hendaknya menjadi "akar" dan "sumber" bagi pembentukan jati diri bangsa dan proses regenerasi bangsa. Di sini kita mesti dapat kembali kepada akar budaya kita sendiri. Jika tidak, dapat diprediksi bahwa sangat mungkin di tengah iklim global, kita tidak akan memiliki jati diri yang benar-benar tumbuh dari budaya kita sendiri.

Atas dasar itu, budaya daerah sangat penting bagi pembentukan karakteristik bangsa. Abdul Hadi W.M. (1998:8-9) juga pernah menyatakan bahwa unsur tradisi tetap menjadi sumber inspirasi baik dalam pembentukan jiwa bangsa maupun sumber ciptaan karya baru. Dalam karya puisi, misalnya kita melihatnya dalam karya-karya Amir Hamzah, Sutardji Calzoum Bachri, Emha Ainun Nadjib, Zawawi Imron. Dalam karya prosa, misalnya kita melihatnya dalam prosa lirik karya Linus Suryadi AG, cerpen-cerpen Danarto, cerpen-cerpen dan novel Umar Kayam, novel-novel Ahmad Tohari, dan Y.B. Mangunwijaya. Dalam karya drama, misalnya kita melihatnya dalam karya-karya Arifin C. Noer dan N. Riantiarno. Begitu juga dalam karya seni lainnya seperti seni lukis, rupa, tari, kita melihat begitu banyak karya baru berangkat dari sumber dan akar tradisi. Kenyataan

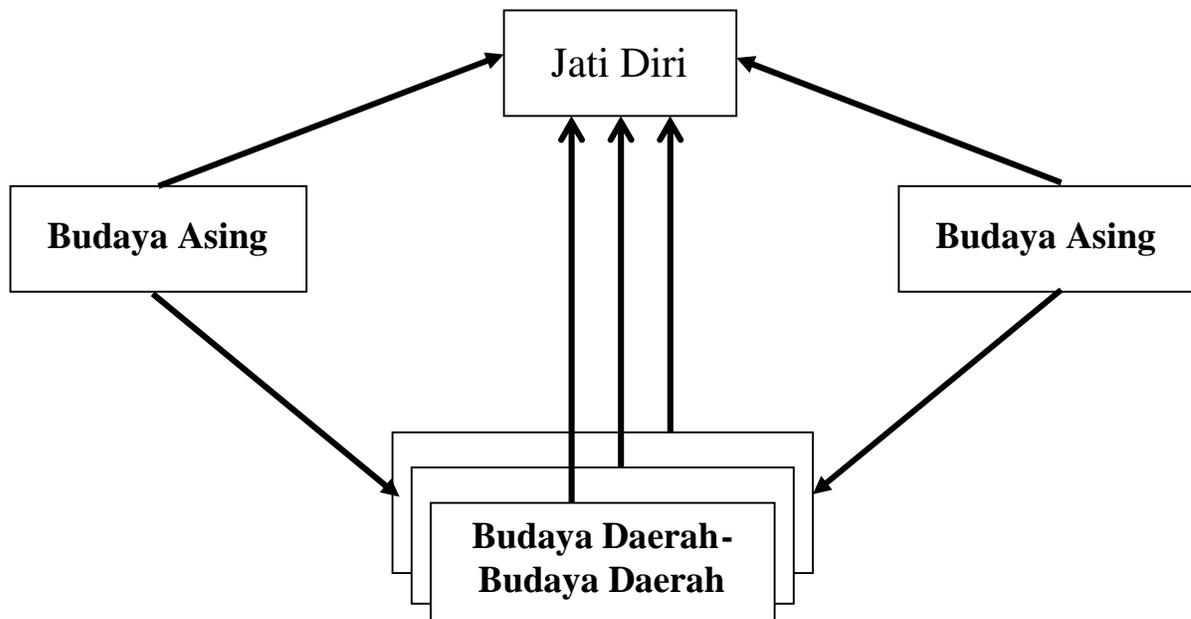
budaya ini membuktikan bahwa tradisi masih menjadi pijakan penting dalam berkreasi.

Untuk itu, dengan upaya pemberdayaan budaya daerah, berarti kita telah berusaha memfungsikan budaya daerah kita bagi komunitas masyarakatnya masing-masing. Jika kita sepakat untuk menganggap bahwa pemberdayaan budaya daerah itu penting, kini kita harus segera memikirkan bagaimana cara pemberdayaan dan revitalisasi budaya daerah.

Apabila dilihat dalam gambar, maka proses pembentukan jati diri bangsa dalam konteks budaya daerah dan budaya asing itu sebenarnya harus lebih banyak berlandaskan pada budaya daerah sendiri dan bukan pada budaya asing. Dalam pembentukan jati diri bangsa, budaya daerahlah yang lebih banyak memainkan peranannya, sedangkan budaya asing berfungsi secara tidak langsung untuk memperkaya budaya daerah itu.

Dari gambar tersebut dapat dipahami bahwa budaya-budaya daerah itulah yang seharusnya menjadi fundamen utama dalam pembentukan jati diri bangsa, bukan budaya asing. Apa yang disebut jati diri di sini tidak lain adalah karakteristik jiwa bangsa yang bersumber dari akar budaya masing-masing. Budaya-budaya daerah yang membentuk karakteristik masyarakatnya masing-masing, dengan sendirinya juga akan memberi jati diri pada setiap anak bangsa Indonesia. Dalam proses modernisasi atau dalam situasi apa pun jati diri bangsa harus tetap ada.

Di samping itu, kita juga perlu menyadari bahwa globalisasi secara simultan pasti membawa dua dampak (*effects*), yakni dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, dalam memasuki era globalisasi tersebut, tantangan berat yang sesungguhnya harus kita hadapi adalah memperkuat moral dan budaya bangsa.



Saat ini, tantangan budaya ini kini tampak masih terabaikan. Secara realistis, selama ini kita masih lebih cenderung *concern* pada tantangan lainnya yang *notabene* juga penting dalam globalisasi yakni meningkatkan daya saing (ekonomi) dan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan-teknologi (iptek). Yang jelas, ketiga tantangan besar tersebut, semuanya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bermoral, berbudaya, berdaya saing tinggi dan berwatak iptek itu, kita bangun utamanya melalui pendidikan, baik pendidikan formal dan nonformal.

Oleh karena ancaman globalisasi yang paling mendasar adalah globalisasi budaya --yang dalam hal ini bersamaan dengan globalisasi ekonomi-- strategi yang harus diutamakan adalah strategi budaya, yang sebenarnya tidak kalah pentingnya dengan strategi ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, persoalan urgen yang perlu dipertanyakan pada saat ini adalah: Bagaimanakah strategi budaya kita selama ini? Sudahkah strategi budaya kita dapat memberi kesempatan bagi pemberdayaan budaya daerah? Jika belum, strategi macam apakah yang harus kita gunakan agar budaya daerah dapat diberdayakan secara proporsional? Inilah masalah-masalah fundamental yang sesungguhnya menjadi persoalan bangsa kita dan yang hendak dikaji di sini.

Peranan Budaya Daerah

Hampir semua pengamat budaya kita pernah menyatakan dan bahkan menyepakati bahwa keberadaan budaya daerah tidak bisa diabaikan terutama dalam kehidupan masyarakat warganya masing-masing. Dikatakan demikian, karena budaya lokal memi-

liki peranan (*role*) yang sangat menentukan dalam kehidupan masyarakatnya. Budaya daerah --dan juga termasuk kesadaran sejarah-- pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jati diri bangsa (*nation identity*). Edi Sedyawati (1994:8) menyatakan bahwa budaya daerah --sebagai warisan budaya bangsa-- itulah yang membuat suatu budaya bangsa mempunyai "akar".

Haviland (1988:223) juga menyatakan bahwa budaya tradisi (daerah) dapat menentukan norma untuk perilaku yang teratur, serta kesenian verbal pada umumnya meneruskan kebiasaan dan nilai-nilai budaya daerah (bangsa). Setiap bentuk budaya daerah dapat menambah eratnya ikatan solidaritas masyarakat yang bersangkutan. Bascom (Danandjaja, 1997:19) menyatakan, ada empat peranan budaya daerah yakni:

- (a) sebagai sistem proyeksi (*projective system*) adalah pencerminan angan-angan suatu kolektif,
- (b) sebagai pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan,
- (c) sebagai alat pendidikan anak (*pedagogical device*), dan
- (d) sebagai alat kontrol agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya.

Kemudian, yang perlu dipegang di sini bahwa setiap orang yang memiliki budaya daerah setempat dan menganut nilai-nilainya, harus bisa memperluas diri untuk memahami diri sebagai orang Indonesia; bukannya berpegang sempit kepada nilai-nilai aslinya. Artinya, tiap-tiap orang yang semula diarahkan oleh "wilayah budaya" (*culture area*) daerah dan sukunya sendiri, selanjutnya perlu memperluas wilayah budaya itu menjadi wilayah budaya Indonesia.

Misalnya, orang Jawa, tanpa kehilangan ciri "kejawaannya" harus mampu

merasakan sebagai orang Indonesia; orang Bali tanpa harus kehilangan "kebaliannya" harus mampu merasakan sebagai orang Indonesia. Demikian juga seterusnya yang terjadi pada orang Sunda, Minangkabau, Batak, Lombok, Bugis, Maluku, Irian, dan sebagainya. Menurut Yampolsky (1995: 702-8), dalam upaya pengembangan budaya daerah itu sendiri, sikap feodal dan kedaerahan yang sempit dan pengaruh budaya asing yang negatif, perlu dicegah.

Sebagai orang Indonesia, tiap-tiap orang di daerah-daerah tidak mesti kehilangan akar budaya aslinya (*indigenous*-nya) sendiri. Hanya masing-masing perlu memperluas pandangan dan sikap budayanya, bukan mengubah dan menggantikan budaya asli dengan budaya Indonesia. Kekhasan masing-masing daerah atau suku bangsa dapat menjadi "akar" bagi perkembangan pribadi setiap perorangan. Oleh karena itu, akar tersebut harus tetap dipertahankan.

Memiliki kepribadian atau identitas diri merupakan kepentingan manusiawi yang mutlak. Orang yang tidak memiliki kepribadian atau identitas diri, dapat diibaratkan seakan-akan seperti orang yang terkatung-katung karakterisasinya karena merasa tidak ada akarnya. Jadi, sekali lagi, kekhasan unsur-unsur masing-masing budaya daerah atau suku bangsa sendiri memang sangat penting dipertahankan --terlebih lagi apabila di masa mendatang benar-benar akan diberlakukan otonomi daerah dan bergulirnya era global dengan budaya mondial.

Dengan akar yang mantap, yang merupakan jaminan kesiambungan budaya, maka pembangunan watak bangsa dijamin pula mampu menghadapi situasi di semua zaman. Pengaruh globalisasi --sebagaimana yang acapkali dikhawatirkan dapat menghilangkan kepribadian bangsa-- akan dapat dihadapi secara mantap tanpa rasa kekhawatiran. Justru manusia yang kuat akarnya dalam budaya sendiri akan lebih mampu

menampung pengaruh itu secara selektif sesuai dengan kepribadiannya.

Orang semacam itu dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki kekuatan watak dan jati diri, sehingga ia tidak mudah tergoyahkan. Dengan demikian, ia mampu memperluas jangkauan hidup sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa harus kehilangan watak pribadinya. Ia mampu pula menghadapi atau mengadakan modernisasi dan inovasi dalam berbagai segi hidupnya. Misalnya, pada seorang seniman, kekuatan jati diri yang dimilikinya akan tampak dalam ekspresi karya seninya.

Pembaruan Strategi Budaya

Menyinggung perihal strategi budaya, kita dapat mengetahuinya melalui pasal 32 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Ungkapan singkat itu secara tegas menunjukkan bahwa pokok perhatian kita tampaknya lebih tertuju pada peningkatan dan pengembangan "budaya nasional". Istilah "budaya nasional" itu sendiri selama ini belum jelas benar, alias masih kabur. Konsep apakah sebenarnya dimaksudkan "budaya nasional" tersebut.

Selanjutnya, jika kita melihat penjelasan pasal itu di dalamnya dikatakan:

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan yang lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dan kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Apabila pasal dan penjelasan tersebut dicermati secara seksama, tampak adanya ketidakjelasan bagaimana pemahaman tentang budaya daerah dan budaya nasional. Namun, yang jelas, "budaya daerah" di sini seakan-akan tidak mempunyai arti penting. Ditambah lagi dengan digunakannya istilah "kebudayaan nasional" dalam pasal tersebut, dapat dinilai sungguh tidak netral. Mengapa? Oleh karena istilah tersebut tampak lebih merupakan ideologi politik ketimbang sebuah istilah netral yang mengacu pada konsep-konsep budaya.

Dengan perkataan lain, istilah "kebudayaan nasional" itu lebih cenderung merupakan slogan politik yang selama rezim Orde Baru (Orba) seringkali dipakai menjadi alat politik pemerintah untuk memberangus energi-energi lokal (*local genius*). Bahkan apabila dipandang perlu, Orba secara tidak langsung juga telah memasung benih-benih pertumbuhan semua energi lokal budaya bangsa kita.

Yang jelas, Orba memang memiliki kepentingan atas semua itu, yang di dasarkan pada dua alasan yakni:

- (1) untuk memperoleh kepastian bahwa loyalitas daerah tidak sampai mengancam persatuan nasional sekaligus penilaian tentang perbedaan dan keragaman jangan sampai mengarah pada disintegrasi bangsa.
- (2) kebudayaan sengaja ingin dipersepsi sebagai pencipta sebuah kondisi yang baik untuk bisa melancarkan pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Lalu ungkapan sloganistik seperti "membina kebudayaan" secara jelas mengindikasikan bagaimana pemerintah Orba tanpa henti-hentinya senantiasa bernafsu ingin meletakkan semua yang berkaitan kebudayaan nasional ke dalam "genggaman" kontrol pemerintah.

Atas semua itu, istilah "kebudayaan nasional" di sini dapat dinilai tidak relevan lagi untuk mencermati fenomena pluralisme budaya Indonesia. Di samping itu, kita juga dapat menyaksikan sebuah "tragedi budaya" yakni berupa fakta bagaimana rezim Orba di masa lampau telah menjadi contoh nyata rekayasa sebuah kebudayaan nasional yang dilakukan lewat proses politik kekerasan dan fisik.

Untuk itu, maka istilah "kebudayaan nasional" --sebagaimana tertuang dalam pasal tersebut-- kini memang sebaiknya tidak digunakan lagi. Alasan yang sangat fundamental adalah karena ungkapan tersebut secara sistematis dilakukan melalui jalur birokrasi yang cenderung bersikap merepresi daya kritis dan daya apresiatif masyarakat.

Dalam hal ini, kepentingan birokrasi seringkali mengintervensi dan menghegemoni budaya, membuat budaya itu tidak memiliki kebebasan mengembangkan dirinya secara wajar. Satu contoh nyata adalah banyak seni pertunjukkan (entah seni wayang, teater rakyat, atau yang lain) di masa rezim Orba hanya menjadi "kendaraan birokrasi", yang secara nyata bisa disimak dari pesan-pesan yang disampaikan, yang cenderung tendensius. Konsekuensinya, seni tradisi itu tidak dapat menampilkan dirinya secara utuh sebagai kreasi seni.

Dengan istilah kebudayaan nasional itu pula acapkali nilai pluralitas tidak dihargai; keanekaragaman budaya daerah seakan-akan dikekang pertumbuhan dan perkembangannya. Ia seolah-olah tidak memiliki ruang gerak yang jelas dalam lingkungan komunitasnya. Budaya cenderung mengarah pada suatu sentralitas yang bersifat monolitis.

Dalam kondisi semacam itu, otomatis budaya daerah tidak menjadi unsur penting. Budaya daerah tidak mendapat perhatian yang serius. Maka tidak heran jika banyak budaya daerah (tradisi) kita yang

sulit berkembang dan bahkan mengalami kematian (*dead culture*). Haruskah nasib budaya daerah kita biarkan dalam posisinya yang demikian? Yang jelas, kita harus mereposisi kedudukan budaya daerah, agar budaya daerah tersebut dapat berkembang secara proporsional.

Oleh karena itu, pasal 32 UUD 1945 itu perlu direformasi (diamandemen) agar secara substansial dapat mengakomodasi keberadaan dan kepentingan pengembangan budaya daerah. Istilah yang berbau politis, seperti "kebudayaan nasional" itu, sebaiknya diganti dengan ungkapan yang lain saja, yang lebih netral dan benar-benar mewakili substansi budaya itu sendiri. Misalnya, istilah "kebudayaan nasional" barangkali akan lebih netral seandainya diganti dengan istilah "kebudayaan Indonesia", karena terasa lebih dapat kita interpretasi bahwa di dalamnya terekspresikan nilai-nilai "keindonesiaan" dan tercakup berbagai budaya daerah di seluruh Indonesia. Dengan konsep "kebudayaan nasional", lalu apa yang dapat kita interpretasi, tentu sangat tidak jelas.

Atas dasar itu, dewasa ini, strategi budaya kita kiranya perlu diarahkan kembali pada pemberdayaan budaya daerah (tradisi), yang tersebar luas di seluruh pelosok Tanah Air. Pelestarian dan pengembangan budaya daerah memiliki arti penting, sebab dengan budaya itulah kita dapat membentuk jati diri bangsa.

Cerita Rakyat:

Pelestarian dan Pengembangannya

Cerita rakyat merupakan bagian dari budaya daerah dan sekaligus sebagai salah satu unsur budaya Indonesia. Cerita rakyat ini sebenarnya masih hidup di dalam masyarakat masing-masing. Hanya saja, karena tidak mendapat perlindungan, cerita rakyat seakan-akan sudah mati.

Padahal, di beberapa daerah cerita rakyat masih sangat digemari. Satu contoh saja, di daerah Bali, cerita rakyat masih sering dituturkan dalam komunitasnya. Cerita rakyat masih dianggap sebagai bagian unsur budaya daerah yang fungsional bagi pembentukan mental dan kepribadian komunitas masyarakatnya.

Dalam kedudukan sebagai budaya daerah, cerita rakyat merupakan salah satu bentuk tradisi lisan (*folklore*) yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat penduduknya. Di dalam cerita rakyat acapkali terefleksikan fenomena sosial masyarakatnya.

Secara keseluruhan, Danandjaja (1997:22) mengklasifikasi tradisi lisan menjadi enam bentuk, yakni: (a) bahasa rakyat, (b) ungkapan tradisional, (c) pernyataan tradisional, (d) sajak dalam puisi rakyat, (e) cerita prosa rakyat, dan (f) nyanyian rakyat. Namun, berdasar pengamatan di lapangan, di antara bentuk-bentuk tersebut cerita prosa rakyatlah yang paling banyak berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakatnya.

Menurut Bascom (Danandjaja, 1997: 50), cerita prosa itu pun kemudian diklasifikasi lagi menjadi (a) mite (*myth*), (b) legenda (*legend*), dan dongeng (*folktale*). Cerita rakyat tersebut menyebar di semua daerah di wilayah Indonesia. Sebagai contoh, kita mengenal ada cerita *Dewi Rengganis* dalam masyarakat Lombok, *Jayaprana* dalam masyarakat Bali, *Walisinga* dalam masyarakat Jawa, *Makyong* dalam masyarakat Minang, *Bini-bini* dalam masyarakat Rote, *Rara Anteng dan Jaka Seger* dalam masyarakat Tengger. Kemudian di Makassar ada tradisi *Sinlirik*, di Kalimantan ada tradisi *Kaharingan*, dan sebagainya.

Tradisi-tradisi lisan atau cerita-cerita prosa lisan seperti itu memegang peranan cukup penting, merupakan sarana yang

efektif untuk sarana pendidikan moral di lingkungan keluarga (nonformal). Untuk itu, cerita rakyat sebagai bagian dari budaya daerah, perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Menyinggung istilah "pelestarian", pelestarian tidaklah diberi arti 'tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, kekal' (sebagaimana yang masih sangat dominan diartikan selama ini). Perlu disadari bahwa dalam konsep "pelestarian" itu sebenarnya terkandung juga pengertian 'kesinambungan dan perubahan' (*continuity and change*) (Singleton, 1974:29).

Konsep ini bisa juga dikaitkan dengan pernyataan Herskovits (1956:18) mengenai salah satu karakteristik dasar dari budaya (*essential natura of culture*) bahwa paradoks yang selalu ada di dalam diri budaya itu sendiri yaitu: "Culture is stable, yet culture is also dynamic, and manifests continuous and constant change". Maksudnya, suatu budaya memiliki dalam dirinya sekaligus keadaan lestari (*stable*) dan keadaan senantiasa berubah (*ever-change*).

Melalui cara berpikir seperti itu, kini kita dapat membebaskan diri dari paradoks tentang makna dalam pengertian "lestari" itu. Yang terang, masalah pelestarian dan perubahan bukanlah bersifat "mutlak", namun justru "relatif".

Dalam kenyataan, kita tidak pernah menemukan budaya yang benar-benar statis (kecuali *dead culture*) sebab di dalamnya pasti akan ada unsur yang berubah. Sebaliknya, tidak ada budaya yang mengandung unsur dinamis (berubah) *an sich*, karena pasti akan terdapat di dalam dirinya unsur-unsur yang lestari, misalnya ada nilai-nilai fundamental bangsa (nilai religio-sitas, solidaritas, toleransi, sopan santun, dan sebagainya).

Untuk itu, dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya daerah,

khususnya pada cerita rakyat (dongeng), ada beberapa upaya yang dapat diajukan di sini.

- (1) Mensosialisasian cerita rakyat pada anak-anak sejak usia masih dini secara dinamis, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Dengan pensosialisasian ini dalam waktu dini ini, anak-anak lebih dahulu mengetahui budayanya sendiri, sebelum diberondongi dengan budaya asing lewat media elektronik televisi, internet, atau parabola.
- (2) Menghidupkan kembali "sanggar-sanggar budaya" atau "kantong-kantong budaya" dalam lingkungan komunitas budaya daerah masing-masing, baik di luar maupun di dalam sekolah. Terutamanya dalam kegiatan ekstrakurikuler, siswa hendaknya diajak untuk lebih banyak mengenali, memahami, dan menghayati budayanya sendiri, baik dalam bentuk pembacaan, penceritaan, maupun pementasan cerita-cerita daerah tersebut (dalam bentuk *creative dramatic* atau drama anak-anak).
- (3) Mendirikan taman-taman bacaan guna menumbuhkan budaya keberaksaraan (*literacy*), dengan materi bacaan dominan tentang cerita rakyat budaya daerah. Kemudahan memperoleh bahan bacaan budaya daerah dan pembiasaan anak dalam membaca karya-karya budaya daerah, dengan sendirinya akan dapat menumbuhkan kecintaan anak pada budayanya sendiri. Bukankah sekarang ini anak-anak tidak banyak diperkenalkan dengan budayanya sendiri? Bukankah sekarang ini anak-anak telanjur terlebih dahulu diperkenalkan dengan budaya asing?
- (4) Menjadikan cerita rakyat sebagai materi utama dalam tayangan media televisi atau siaran radio (khususnya dalam acara anak-anak), gambar-gambar, buku-buku cerita, mainan, dan sebagainya. Untuk dapat mewujudkan semua ini, perlu ada kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah, (pemilik) media massa, lembaga pendidikan, masyarakat, penerbit, dan semua lembaga terkait lainnya.
- (5) Menggalakkan dan mengembangkan sastra anak-anak di Indonesia. Selama ini sastra anak-anak Indonesia tidak maju dan tidak dicari pembaca anak-anak karena tidak pernah melibatkan "emosi" dan "kognisi" anak, kecuali keinginan pengarang dan pencerita untuk mengggurui dan mengajarkan sesuatu yang bukan problematika anak-anak (*Kompas*, 15 November 1999).

Cerita atau dongeng anak akan menjadi andalan dunia sastra anak Indonesia kembali jika masyarakat mampu menyegarkan dongeng dengan berbagai modifikasi, sehingga dongeng tidak ditinggalkan karena kenaifannya. Dalam perkataan lain, kita harus mendekonstruksinya agar mampu berkompetisi dalam lautan teks pop yang dahsyat. Modifikasi misalnya dapat kita lakukan dalam pengkarakteran, struktur, dan pembahasannya.

Penutup

Dengan beberapa upaya pemberdayaan budaya daerah (cerita rakyat) tersebut, diharapkan nantinya generasi bangsa kita lebih mengenali, memahami, dan menghayati budaya sendiri. Semua itu penting artinya bagi pembentukan jati diri bangsa dan proses regenerasi bangsa. Dengan

demikian, jati diri bangsa tidak dibentuk dari budaya asing (seperti tampak dalam fenomena yang terjadi sekarang ini pada anak-anak bangsa kita), tetapi seharusnya dari budaya daerah kita sendiri.

Anak-anak bangsa kita yang sekarang sangat menggandrungi budaya asing --dan tampak telah kehilangan jati dirinya-- menjadi permasalahan bangsa yang sangat serius, yang harus kita atasi sebijak mungkin. Kita mengetahui, jati diri mereka sekarang ini tampak bukan dibangun dari budaya sendiri. Terbukti dalam keseharian mereka selalu mengidentikkan dirinya dengan tokoh-tokoh idola asing (*Mister Black, Tin-tin, Doraemon, Power Rangers, Disne World*, dan sebagainya).

Mereka kelihatannya sama sekali tidak mengenal tokoh-tokoh dalam budaya daerahnya sen-diri, apalagi pesan-pesan moral atau nilai-nilai budaya adiluhungnya. Mereka seakan-akan lepas dan begitu asing dari budayanya sendiri. Kenyataan itu tentunya merupakan ironisme bahwa mereka hidup dalam ling-kungan budaya daerahnya sendiri, tetapi cenderung berjati diri budaya asing.

Kenyataan budaya ini sebenarnya tentu menjadi keprihatinan kita sudah sejak lama, yang seolah-olah sudah *taken for granted*, dan terkadang luput dari kesadaran kita selaku bangsa yang seharusnya memiliki jati diri sendiri.

Apabila kenyataan budaya yang demikian itu tidak segera diantisipasi, dapat dipastikan generasi kita di masa-masa mendatang akan kehilangan "akar", "sumber", dan "pijakan" budayanya sendiri. Konsekuensi lebih jauh adalah mereka tidak akan memiliki jati diri bangsa yang jelas, mereka akan kehilangan "rasa, jiwa, dan semangat kedaerahan", bahkan "rasa, jiwa, dan semangat keindonesiaan" karena di dalam dirinya tidak pernah tumbuh dan tidak

pernah tertanam nilai-nilai kedaerahan (tradisi) atau nilai-nilai keindonesiaan itu.

Jika dibiarkan berlarut-larut seperti itu, pada gilirannya, sebutan "Indonesia" --cepat atau lambat-- hanya akan menjadi seonggok simbol tanpa makna, tanpa jiwa, dan hanya akan menjadi slogan semata.

Daftar Pustaka

- Danandjaja, James, *Folklor Indonesia: Ilmu Gosif, Dongeng, dan Lain-lain* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).
- Hadi W.M., Abdul, "Kembali Ke Akar Kembali Ke Sumber" dalam *Jurnal Kebudayaan Ulumul Qur'an*, 1/VIII, 1998, 8-18.
- Haviland, William A. *Antropologi*, Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Herskovits, Melville J., *Man and His Works* (New York: A.A. Knopf, 1956).
- Hrd., "Sastra Anak-anak Tak Libatkan Emosi dan Pikiran Kecuali Menggurui" dalam *Kompas*, 15 November 1999.
- Peursen, van, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1985).
- Singleton, John, "Implication of Education as Culture Transmision" dalam George D. Spindler (ed.), *Education and Cultural Process* (New York: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1974).
- Yampolsky, Philip, "Forces for Change in the Regional Performing Arts of

Indonesia, Bijdragen, Tot de Taal Landen Volkenkunde," in Clara Brakel-Papenhuyzen and Win van Zanten (eds.), *Dell 151* (Leiden: Journal of The Royal Institut of Linguistics and Antropology, 1995).